

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Pengertian UUPA dan UUAP	15
2.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	20
2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	22

2.1.4. Peraturan Kepala Badan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	24
2.1.5. Peraturan Kepala Badan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.....	27
2.1.6. Pengertian Hukum Tanah	30
2.1.7. Pengertian Pendaftaran Tanah	31
2.1.8. Pengertian Sertifikat	33
2.2. Landasan Konseptual	33
2.2.1. Sertipikat Ganda	33
2.2.1.1. Sengketa Pertanahan	34
2.2.1.2. Sengketa Tata Usaha Negara	36
2.2.2. Kepastian Hukum	37
2.2.2.1. Jaminan Kepastian Hukum	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	42
3.1.1. Metode Penelitian	42
3.1.2. Jenis Metode Penelitian	43
3.2. Jenis Data Yang Dibutuhkan	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data	47
3.4. Jenis Pendekatan	47
3.5. Tenkin Analisis Data	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1. Kasus Posisi	51
4.1.1. Para Pihak	51

4.1.1.1. Habib Alwi Almoutohar	51
4.1.1.2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak	51
4.1.1.3. Bambang Widjanarko	52
4.1.2. Duduk Perkara	52
4.1.3. Pertimbangan Hukum	56
4.1.4. Amar Putusan	62
4.2. Kepastian Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Yang Diterbitkan Lebih Dulu Dari Penerbitan Kembali Sertifikat Hak Di Atas Tanah Yang Sama Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021	63
4.3. Perlindungan Hukum Sertifikat Hak Milik Di Atas Tanah Yang Sama Diterbitkan Kembali Beberapa Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pihak Ketiga Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN-PTK)	71
BAB V PENUTUP	
5.1. KESIMPULAN	80
5.1. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82